

DALAM PERSPEKTIF EKONOMI, MUNGKINKAH REUNIFIKASI CHINA – TAIWAN DILAKUKAN MELALUI JALAN DAMAI

DIMASTI DANO

Universitas Megou Pak Tulang Bawang
dimastidano@umptb.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh hubungan ekonomi China-Taiwan, hubungan politik Amerika Serikat dan faktor dalam negeri Taiwan terhadap proses reunifikasi damai. Penelitian dilakukan pada 1 sampai dengan 30 Desember 2022. Teknik pengumpulan data melalui kajian pustaka yang terkait dengan penelitian, diantaranya jurnal, berita dari media sosial dan lain-lain. Dalam persepsi ekonomi, peluang reunifikasi damai China – Taiwan masih terbuka, dengan catatan bila hubungan ekonomi ke dua negara dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi ikatan ekonomi yang kuat, terintegrasi dan saling ketergantungan. Belajar dari konflik Rusia-Ukraina, opsi militer yang diambil oleh kedua belah pihak akan menyebabkan “kehancuran ekonomi” kedua negara secara bersamaan. Tetapi perlu pendekatan lain yang harus sejalan terutama untuk menarik mayoritas penduduk Taiwan dari *status quo* menjadi mendukung reunifikasi damai. Strategi lain adalah terus memacu peningkatan kemampuan militer China untuk dapat meningkatkan efek deteren terhadap Amerika Serikat dan aliansi militernya, dengan tujuan agar Amerika Serikat dapat menahan diri untuk tidak turut campur tangan terhadap permasalahan yang terkait reunifikasi. Pada saat yang sama, China juga harus dapat menahan diri untuk tidak membuka konflik dengan negara lain terutama dengan negara-negara di kawasan laut Natuna Utara.

Kata Kunci: Reunifikasi Damai, Hubungan Ekonomi, Konflik Militer

ABSTRACT

The purpose of this study aims to analyze the influence of China-Taiwan economic relations, United States political relations, and Taiwan's internal factors on the peaceful reunification process. The research was conducted from 1 to 30 December 2022. Data collection techniques were through literature review related to research, including journals, news from social media, and others. In terms of economic perception, the opportunity for the peaceful reunification of China - Taiwan is still open, provided that the economic relations between the two countries can continue to be improved so that they become strong, integrated, and interdependent economic bonds. Learning from the Russia-Ukraine conflict, the military options taken by both sides will lead to the economic destruction" of the two countries simultaneously. But another approach is needed that must be in line especially to attract the majority of Taiwan's population whose status quo supports peaceful reunification. Another strategy is to continue to spur the increase in China's military capabilities to be able to increase the deterrent effect on the United States and its military alliances, with the aim that the United States can refrain from intervening in issues related to reunification. At the same time, China must also be able to refrain from opening conflicts with other countries, especially with countries in the North Natuna sea area.

Keywords: Peaceful Reunification, Economic Relations, Military Conflicts

PENDAHULUAN

Konflik yang terjadi saat ini antara China dan Taiwan berawal pada tahun 1949 ketika Chiang Kai-Shek dan para pengikutnya melarikan diri ke Taiwan setelah kalah dari komunis China dalam perang saudara di China. Sejak saat itu para pemimpin China menganggap Taiwan adalah bagian dari China dan secara konsisten terus mendefinisikan Taiwan sebagai “bagian

yang tidak terpisahkan”, bila perlu proses unifikasinya dapat dilakukan dengan kekerasan, karena merupakan tuntutan sejarah yang tidak dapat dihentikan oleh siapa pun atau kekuatan apa pun (Li, 2020).

Beijing mendeklarasikan ”prinsip satu China (*yige Zhongguo yuanze* 一个中国原则)” sebagai “hanya satu China di dunia, dan Taiwan adalah bagian dari China dan pemerintahan China yang merupakan negara yang legal (TAO, 2000). Bagi China, reunifikasi China – Taiwan bukan merupakan keniscayaan. Seperti dikutip oleh BBC, Presiden Xi Jinping dalam pidatonya secara tegas mengatakan: "*The historical task of the complete reunification of the motherland must be fulfilled, and will definitely be fulfilled,*" (Xi Jinping, 2021). Selain itu, China berusaha mempengaruhi opini publik di Taiwan dengan “menjalin ikatan hati dan pikiran yang lebih erat” melalui berbagai pertukaran sosial dan komunikasi. Pada sisi lain, pidato Xi mengungkapkan bahwa di dunia yang saling ketergantungan, baik tata negara ekonomi dan penetrasi sosial telah menjadi dua strategi penting bagi China untuk memperluas pengaruhnya di Taiwan (Chang & Yang, 2020).

Meskipun tampaknya belum ada solusi akhir untuk masalah Taiwan di masa mendatang, perkembangan di Selat Taiwan yang menarik adalah hubungan ekonomi yang tumbuh secara drastis antara kedua negara. Hubungan ekonomi yang saat ini dipercaya akan berdampak positif pada hubungan China-Taiwan, karena menurut pandangan liberal, hubungan ekonomi yang baik antar negara akan mengarah pada perdamaian. Jika argumen ini benar, maka kita mungkin akan melihat hubungan yang lebih damai antara China dan Taiwan di masa datang (Chen, 2009). Sebagai contoh, Efek kesepakatan Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA), dipercaya sebagai liberalisasi hubungan ekonomi antara China-Taiwan yang diproyeksikan akan memberi manfaat reformasi ekonomi lintas selat khususnya bagi Taiwan dalam kesembangan geoekonomi yang berpusat di China (Daniel, H.R. & Wang, 2010).

Relasi antara China dengan Taiwan sangat unik, selain adanya ikatan leluhur dan budaya, hubungan perdagangan dan investasi antara keduanya mengejutkan. Meskipun memiliki hubungan ekonomi yang baik, tetapi terdapat gesekan politik antara keduanya. Hubungan lintas selat dicirikan dengan adanya kolaborasi dan juga konflik (Teng, 2019). Beberapa pihak juga berpendapat bahwa integrasi ekonomi antara China dan Taiwan tidak akan mengurangi kemungkinan konflik karena masalah utama yang memicu persaingan adalah masalah yang sangat dipolitisir – masalah identitas dan kedaulatan. Sulit membayangkan bahwa China atau Taiwan akan berkompromi dalam masalah ini (Crane 1993; Chao 2003).

Tetapi, studi literatur hubungan internasional telah merekomendasikan tiga mekanisme yang dapat mengurangi kemungkinan konflik militer antara kedua negara melalui hubungan ekonomi bilateral kedua negara. Pertama, ikatan ekonomi dapat mempengaruhi perilaku negara: meningkatnya biaya konflik militer dan dengan adanya integrasi ekonomi dapat menghalangi negara untuk menyelesaikan perselisihan dengan menggunakan kekuatan militer atau terlibat dalam perilaku provokatif yang mungkin mengundang pembalasan secara militer. Kedua, ikatan ekonomi dapat, dari waktu ke waktu, mengubah tujuan yang dikejar negara, sehingga dapat menyelaraskan dengan tujuan negara lain; dengan demikian, dengan semakin kuatnya integrasi ekonomi maka permusuhan mendasar yang menjadi akar konflik militer dapat dikurang. Terakhir, integrasi ekonomi dapat mendorong negara-negara yang berkonflik untuk menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya, sehingga diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian yang dapat memicu perang dalam situasi krisis (Kastner, 2006).

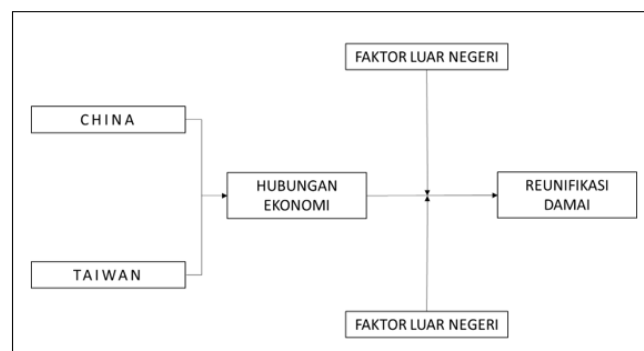
Hubungan ekonomi dan sosial antara China dan Taiwan yang semakin erat dipercaya mengakibatkan terbentuknya integrasi ekonomi dan sosial dari kedua belah pihak yang pada akhirnya menyebabkan saling ketergantungan. Kondisi seperti ini diprediksi akan memiliki potensi untuk mengkatalisasi penyatuan politik antara kedua negara (Davidson, 2015). Dalam

bukunya *The Lexus and the Olive Tree*, Thomas Friedman menegaskan bahwa hubungan ekonomi antara China daratan dan Taiwan akan sangat mempengaruhi terjadinya kemungkinan konflik militer antara kedua belah pihak karena konflik militer pasti akan menyebabkan “kehancuran ekonomi” kedua negara secara bersama. (Ezra & Chen, 2003). Dapat dibayangkan, pangsa pasar global produk utama Taiwan, yaitu: mikrochip mencapai 66%, berarti hampir menguasai dua per tiga pangsa pasar dunia. Runtuhnya manufaktur di Taiwan akan memiliki konsekuensi global yang drastis, yang akan memicu reaksi berantai yang akan berujung pada krisis keuangan dan ekonomi global (Ammar, et. Al. ,2023).

Bahkan, kaum liberal percaya bahwa hubungan ekonomi antar negara mengarah pada perdamaian, hal ini didasarkan pada tiga poin penting (Korbel dan Chen, 2009). Pertama: Biaya mengobarkan perang melawan mitra ekonomi negara sangat tinggi karena berperang melawan negara mitra dagang, berarti sebenarnya berperang melawan dirinya sendiri karena perang antara negara dan mitranya pasti berdampak negatif pada perekonomian negara. Kedua: Ikatan ekonomi mengubah preferensi negara ketika ikatan ekonomi antara dua negara menjadi lebih kuat dan kedua negara ini menjadi lebih saling bergantung atau bahkan terintegrasi secara ekonomi, kepentingan ekonomi – dibandingkan dengan kepentingan nasional lainnya seperti pembangunan militer – menjadi yang paling penting. Ketiga: Ikatan ekonomi yang kuat membuat ancaman nonmiliter seperti sanksi ekonomi menjadi kredibel. Oleh karena itu, ketika terjadi konflik antara dua negara yang memiliki ikatan ekonomi yang kuat, ancaman nonmiliter lebih cenderung menjadi pilihan

METODE PENELITIAN

Penelitian dengan judul: Dalam Persepektif Ekonomi, Mungkinkah Reunifikasi China-Taiwan Dilakukan dalam Jalan Damai? Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan atau studi literatur. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian. Studi literatur didapat dari berbagai sumber baik jurnal, buku, dokumentasi, internet dan pustaka, sebagai rujukannya. Teknik ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan berbagai teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapi/diteliti sebagai bahan rujukan dalam pembahasan hasil penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah: untuk menganalisa pengaruh hubungan ekonomi China-Taiwan, hubungan politik China dengan Amerika Serikat dan faktor dalam negeri Taiwan terhadap proses reunifikasi damai. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yaitu diperoleh dari buku, literatur dan artikel yang memiliki relevansi terhadap objek penelitian ini. Penelitian dilakukan di Bandung pada 1 sampai dengan 30 Desember 2022.



Gambar 1. Kerangka konseptual penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peneliti menemukan 3 hal yang dapat mempengaruhi proses reunifikasi damai China-Taiwan. Yang pertama adalah kemajuan hubungan ekonomi kedua pihak yang terus membaik. Kedua adalah pengaruh rivalitas antara dua negara adidaya Amerika Serikat dan China. Sedangkan yang ketiga adalah pengaruh dinamika politik dalam negeri Taiwan.

1. Hubungan Ekonomi Yang Terus Meningkat.

Pada tahun 1949 hingga 1979, imbas dari konflik politik dan militer, hubungan ekonomi antara China dan Taiwan nyaris nol antara tahun 1949 dan 1979. Pada tanggal 1 Januari 1979, setelah mengadopsi reformasi dan kebijakan terbuka pada akhir tahun 1978, China mengusulkan hubungan tiga sektor antara China dan Taiwan yaitu hubungan perdagangan langsung, pos, dan jaringan transportasi.

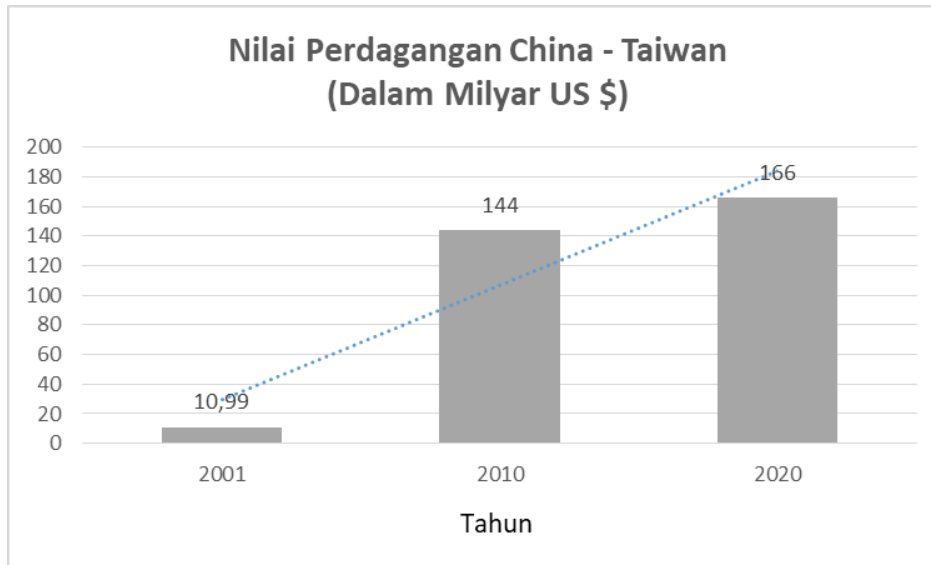
Pada tahun 1980, China membeli produk Taiwan senilai \$80 juta. Pada tahun yang sama, untuk lebih mendorong perdagangan, China mengumumkan kebijakan bebas tarif untuk barang-barang impor buatan Taiwan. Namun, kebijakan tarif nol hanya berlangsung selama satu tahun. Inisiatif Beijing tidak mendapat tanggapan dari Taipei hingga pertengahan 1980-an.

Pada tahun 1985 Taiwan untuk pertama kalinya menanggapi permintaan China untuk perdagangan lintas-Selat dengan mengumumkan “Prinsip Non-interferensi Ekspor Tidak Langsung ke Daratan.” Sejak saat itu, perdagangan lintas-Selat mulai tumbuh pesat seiring dengan meningkatnya reformasi ekonomi China dan pelonggaran pembatasan interaksi ekonomi lintas-Selat secara bertahap. Meski demikian, impor Taiwan dari China masih dalam regulasi. Hanya 53,9 persen (atau 5.777 item) dari 10.724 produk yang diatur dalam Harmonized Tariff Schedule (HS) berkode 10-digit komoditas perdagangan yang diizinkan untuk diimpor dari Cina dari Taiwan masing-masing pada Desember 2000 dan 77,5 persen (atau 8.306 item) pada September 2003 (Tung, 2004).

Pada bulan Juni 2008, pembicaraan yang dilembagakan antara Straits Exchange Foundation Taiwan dengan China’s Association for Relations Across the Taiwan Straits dilanjutkan setelah jeda 10 tahun. Pada Agustus 2015, 11 putaran negosiasi telah diadakan secara bergantian di kedua sisi Selat Taiwan, menghasilkan 23 kesepakatan formal, 21 di antaranya telah berlaku, dan dua konsensus. Yang paling penting di antara kesepakatan tersebut adalah Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) yang disepakati pada Juni 2010, yang bertujuan untuk melembagakan hubungan perdagangan dan ekonomi antara Taiwan dan China (<https://www.taiwan.gov.tw/>).

Data perdagangan China Taiwan

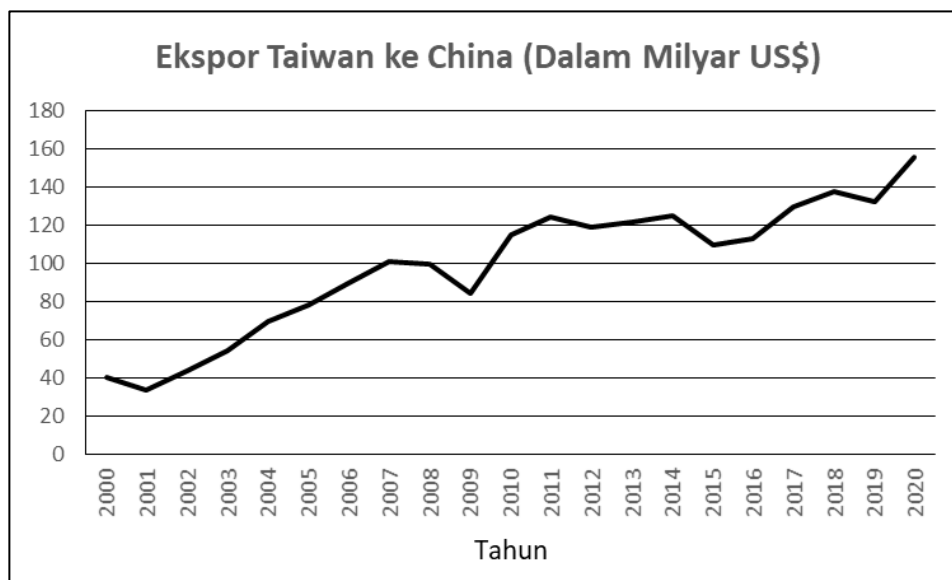
Taiwan merupakan salah satu investor terbesar di China. Antara tahun 1991 dan akhir Mei 2021, investasi yang disetujui di Tiongkok terdiri dari 44.577 investasi dengan total US\$193,51 miliar. Pada tahun 2020, nilai perdagangan lintas selat mencapai US\$166 miliar (<https://www.taiwan.gov.tw/>).



Sumber: diolah dari <https://foreignpolicy.com/2021/04/14/taiwan-china-economic-codependence/>

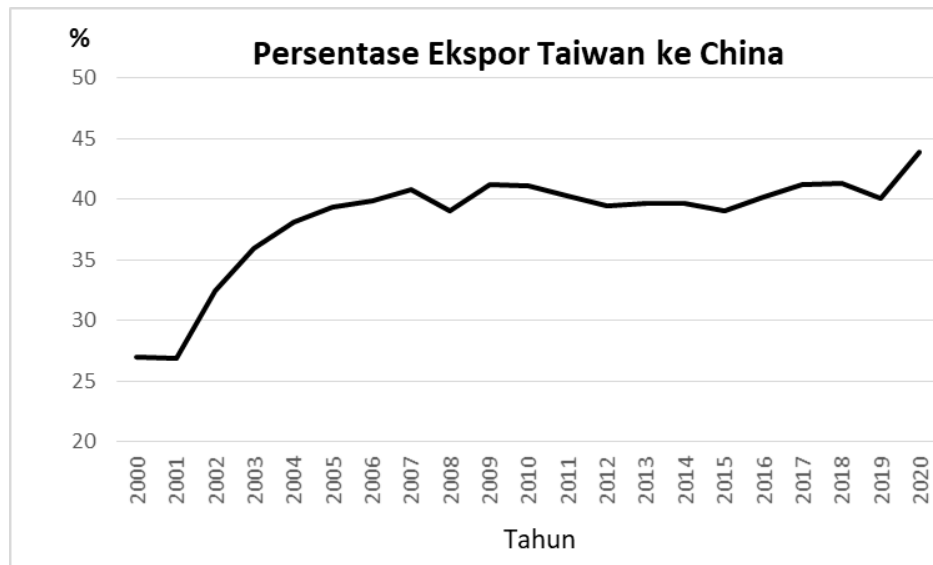
Nilai perdagangan antara China dan Taiwan melesat pesat dari tahun 2001 yang hanya sebesar US\$10,99 milyar menjadi US\$ 144 milyar pada tahun 2010 dan terus meningkat menjadi US\$166 milyar pada tahun 2020.

Hasil kesepakatan penting yaitu Cross-Straits Economic Cooperation Framework Agreement (ECFA) pada Juni 2010, yang bertujuan untuk melembagakan hubungan perdagangan dan ekonomi antara Taiwan dan China memberikan dampak positif bagi perdagangan kedua negara, yang ditunjukkannya peningkatan nilai perdagangan.



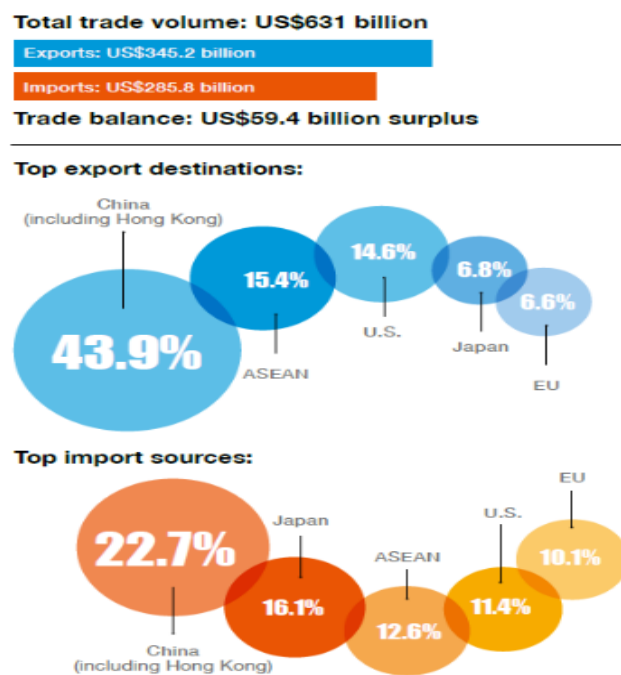
Sumber: diolah dari <https://foreignpolicy.com/2021/04/14/taiwan-china-economic-codependence/>

Ekspor Taiwan ke China meningkat tajam dari US\$ 40 milyar pada tahun 2000 menjadi US\$ 155,55 milyar.



Sumber: diolah dari <https://foreignpolicy.com/2021/04/14/taiwan-china-economic-codependence/>

Data menunjukkan bahwa ekspor terbesar Taiwan pada tahun 2020 justru ditujukan ke China sebesar 43.9%, demikian pula impor terbesar Taiwan justru datang dari China yang mencapai 22.7%.



Sumber: Trade & Investment Profile 2020, https://www.taiwan.gov.tw/content_7.php

2. Rivalitas Dua Negara Adidaya: Amerika Serikat dan China

Perseteruan antara dua negara adidaya: Amerika Serikat dengan China memuncak pada saat terjadinya perang dagang antara AS dengan China. Presiden AS Donald Trump menginisiasi perang dagang, dengan alasan adanya defisit perdagangan dengan China sebesar \$ 419 miliar dengan China pada tahun 2018 yang menurut Trump disebabkan adanya “*unfair trade practice*” dari pemerintah China (Ryan Haas & Abraham, 2020).

Trump menganggap China merupakan rival utama AS. China hingga tahun 2018 mengalami pertumbuhan rata-rata Gross Domestic Product tahunan mencapai 9,5% per tahun. Dengan demikian China berhasil menggandakan GDP setiap delapan tahun dan telah berhasil

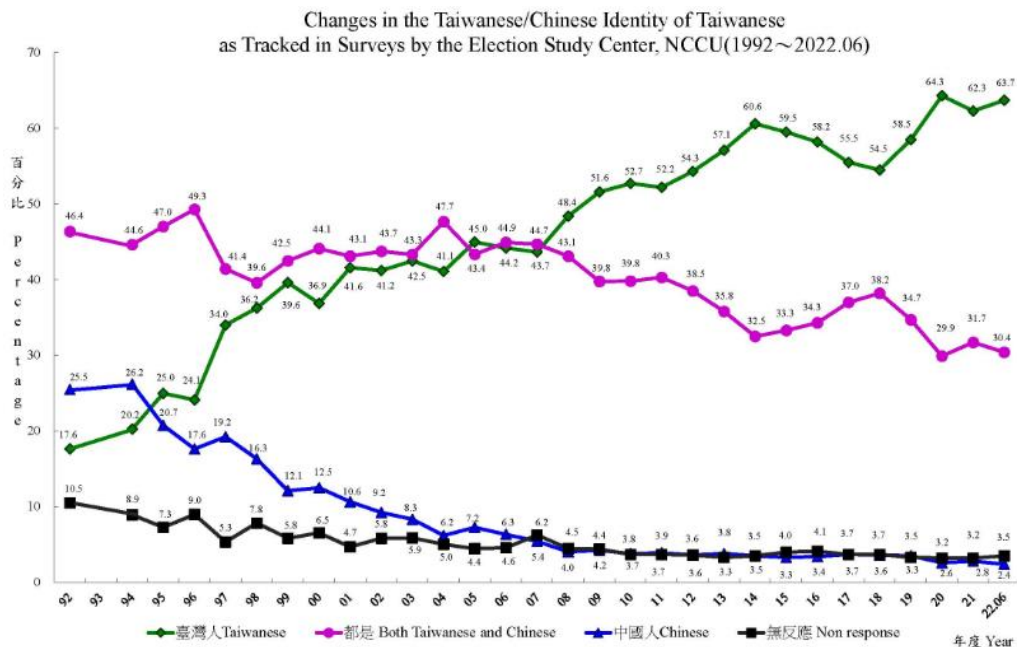
mengentaskan kemiskinan 800 juta penduduknya. World Bank menjulukinya sebagai: *the fastest sustained expansion by a major economy in history*. China berhasil menjadi *the world largest economy* (Morrison, 2019).

Rivalitas antara AS dan China diprediksi akan terus berlanjut hingga mendominasi abad ke-21. Kompetisi keduanya bukan saja dari sisi ekonomi, juga akan melebar pada sisi politik. Dari sudut ekonomi persaingan antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia ini akan menyebabkan krisis ekonomi (Colvin, 2020). Di Amerika Serikat, kebangkitan China dipandang sebagai ancaman bagi posisi dominasinya dalam sistem internasional. Dokumen strategi Administrasi Trump menggambarkan China sebagai kekuatan revisionis yang berupaya merebut hegemoni regional di Indo-Pasifik dari AS dan dalam jangka panjang bertujuan untuk supremasi global (Overhaus, 2020).

Pada November 2022, Presiden AS Joe Biden dan Presiden China Xi Jin Ping mengadakan pembicaraan pertama mereka sejak Presiden Biden menjabat, bertemu di sela-sela KTT G20 di Bali. Presiden Biden mengatakan kepada wartawan, "Saya tidak mencari konflik, saya ingin mengelola kompetisi ini secara bertanggung jawab." Tetapi kemudian pada akhir tahun 2022 Presiden Biden menandatangani anggaran pengeluaran pertahanan termasuk bantuan untuk Taiwan hingga \$10 miliar. Dalam beberapa kesempatan dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Biden menjadi semakin berterus terang, mengatakan bahwa AS akan campur tangan jika China melakukan serangan tanpa alasan (Walker, 2022).

3. Dinamika Politik Dalam Negeri Taiwan

Penelitian dari Universitas Nasional Chengchi dari tahun 1992 hingga Juni 2022, menunjukkan bahwa semakin banyak orang Taiwan merasa lebih mengidentifikasinya sebagai orang Taiwan daripada China daratan.



Sumber: Election Study Center, National Chengchi University (2022),

Hasil survey pada penelitian tersebut pada Juni 2022 menunjukkan terdapat dari 63,7 persen penduduk pulau itu menganggap diri mereka eksklusif sebagai orang Taiwan (survey pada tahun 1992 hanya sebesar 17,6 persen). Sebagai perbandingan survey pada Juni 2022 sebesar 30,4 persen diidentifikasi sebagai orang Taiwan dan China, turun dari dari 46,4 persen

pada survey 1992. Hanya sekitar 2,4 persen menganggap diri mereka hanya orang China, angka yang menurun sejak 1992 yaitu sebesar ketika 17,6 persen (Election Study Center, National Chengchi University, 2022).

Demokratisasi Taiwan telah memungkinkan berbagai sentimen – termasuk pro-kemerdekaan – untuk mengubah wacana dan representasi politik (dan insentif elektoral para pemimpin) pada isu “satu China”. Saat itu, sebagian besar orang di Taiwan mendukung status quo otonomi yang efektif, dan sangat sedikit yang mendukung “penyatuan” (ESC, 2022). Ditambah dengan runtuhnya model “satu negara, dua sistem” terutama ketika China menangani demonstrasi di Hong Kong sejak 2020, dan kemenangan pemilu Democratic Progressive Party (DPP) pada 2016 dan 2020 – secara kolektif telah menempatkan kerangka kerja “satu China” di bawah kondisi terburuk yang belum pernah terjadi sebelumnya (Chen, 2022).

Pembahasan

Ada dua faktor yang harus diperhitungkan secara mendalam oleh China untuk mencapai tujuan reunifikasi damai. Pertama: walaupun perdagangan kedua negara tumbuh dengan baik, tetapi Deng Ping (2000) menemukan bahwa saling ketergantungan ekonomi antara Cina dan Taiwan sebenarnya asimetris: kelebihan arus keluar modal domestik dari Taiwan ke Cina dapat dianggap sebagai bukti saling ketergantungan asimetris di mana Cina memperoleh keuntungan yang relatif lebih banyak daripada Taiwan. Karena itu, beberapa pemimpin politik Taiwan khawatir Taiwan terlalu bergantung secara ekonomi pada China. Di lain pihak China dinilai secara ekonomi tidak terlalu bergantung pada Taiwan, dan terlepas dari investasi pedagang Taiwan. Para pemimpin Taiwan percaya bahwa itu adalah strategi China untuk membuat Taiwan secara ekonomi bergantung pada China, tetapi juga menggunakan pedagang Taiwan yang memiliki kepentingan ekonomi di China, agar dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah Taiwan.

Pertimbangan yang kedua, seandainya China berhasil menguasai Taiwan melalui opsi serbuan militer, maka resiko yang ditanggungnya akan sangat besar, diantaranya mengorbankan ambisinya utama yaitu menjadi negara adidaya global. Beberapa kerugian yang akan diterima China antara lain (Blanchette & DiPippo, 2022): Setiap konflik yang diprakarsai oleh China akan memiliki efek negatif langsung dan dramatis pada kemampuan China untuk: mengimpor dan mengeksport barang, pasar keuangan domestiknya, sentimen bisnis, dan pada nilai tukar mata uangnya. Terutama bila militer AS turut campur tangan, maka biaya yang dikeluarkan China akan meningkat signifikan. Menurut Global Firepower, militer China menduduki ranking no 3 dunia, setelah Amerika Serikat dan Rusia (Global Firepower, 2022), sehingga diprediksi pasukan China dapat mengatasi pertahanan militer Taiwan, tetapi risikonya yang perlu diperhitungkan adalah China akan menduduki sebuah pulau yang dihuni oleh populasi yang bermusuhan dengan ekonomi lokal yang hancur, termasuk sektor industri semikonduktor Taiwan. Seperti halnya konflik Rusia-Ukraina, China sendiri akan menghadapi dampak ekonomi dan tekanan diplomatik yang keras.

Pemerintah China kemudian melakukan revisi tentang kebijakan terkait reunifikasi. Maka tidak aneh bila pada tahun 2022, Dewan Negara China telah merilis buku putih tentang “Masalah Taiwan dan Reunifikasi China di Era Baru.” Buku putih tersebut menguraikan, secara rinci, pendekatan Beijing ke Taiwan di bawah “era baru” kepemimpinan Xi Jinping, dan berfungsi sebagai pembaruan buku putih sebelumnya tentang Taiwan yang dikeluarkan pada tahun 1993 dan 2000. Buku putih ini dimulai dengan menggarisbawahi komitmen China untuk “Menyelesaikan masalah Taiwan dan mewujudkan reunifikasi total China,” menyebut tujuan ini sebagai “aspirasi bersama dari semua putra dan putri bangsa China,” “sangat diperlukan untuk realisasi peremajaan China,” dan “misi bersejarah” Partai Komunis China (PKC). Buku putih mempertahankan preferensi Tiongkok untuk “reunifikasi damai,” yang diidentifikasi

sebagai “pilihan pertama Partai Komunis China (PKC) dan pemerintah Tiongkok.” (Tiezzi, 2022). Pendekatan pemerintah China untuk terus mendorong reunifikasi damai, setidaknya merupakan upaya dalam rangka mempengaruhi dinamika politik dalam negeri Taiwan, pendekatan untuk menarik mayoritas penduduk Taiwan yang *status quo* menjadi mendukung reunifikasi damai

Faktor Amerika Serikat dalam Reunifikasi

Konflik China – Taiwan tidak dapat dihindarkan dari faktor Amerika Serikat. Dilain pihak, turut campur tangannya Amerika Serikat dalam konflik China – Taiwan seperti yang dijanjikan Presiden Biden akan semakin mendorong potensi konflik yang lebih luas. Potensi konflik militer antara dua ekonomi terbesar dunia itu sendiri sudah cukup menakutkan. Rivalitas antara AS dengan China, sebenarnya bisa dirunut sejak keruntuhan Uni Soviet, AS melihat China sebagai rival utama karena tiga hal: pertumbuhan ekonomi dan militer yang pesat serta ideologi yang berseberangan. AS merasa terancam dengan kebangkitan China karena AS selama ini menjadi negara satu - satunya pemimpin ekonomi global yang mempromosikan demokrasi liberal dan ekonomi neoliberal selama tiga dekade terakhir (Klement, 2021).

China merupakan pusat manufaktur top dunia, Taiwan adalah produsen semikonduktor canggih terkemuka, dan Amerika Serikat memiliki pasar modal terbesar dan mata uang unggulan. Konflik kedua raksasa ekonomi akan mengganggu pengiriman global, pelabuhan China menyumbang sekitar 40 persen volume pengiriman di antara 100 pelabuhan terbesar dunia pada tahun 2020. Hampir setengah dari armada peti kemas global dan 88 persen kapal terbesar transit melalui Selat Taiwan. Taiwan juga merupakan simpul penting yang menghubungkan kabel bawah laut dari China dengan seluruh dunia (DiPippo, 2022). Sebuah studi tahun 2016 oleh RAND memperkirakan bahwa perang selama setahun akan mengurangi PDB China sebesar 25 hingga 35 persen dan PDB AS sebesar 5 hingga 10 persen,. Gangguan total terhadap perdagangan China dapat mengurangi nilai tambah perdagangan global sebesar \$2,6 triliun, atau 3 persen dari PDB dunia, ini hanya mencakup efek terhadap perdagangan berdasarkan penilaian rantai pasokan global di masa damai. Pada kenyataannya, gangguan bisa jauh lebih buruk (DiPippo, 2022).

Dari pembahasan diatas, reunifikasi China terhadap Taiwan dapat dilakukan secara damai bila memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Hubungan ekonomi antar selat harus terus ditingkatkan terutama dari sektor perdagangan maupun investasi, karena China merupakan pasar yang menjanjikan bagi investor dan pedagang Taiwan. Hubungan ekonomi yang kuat diharapkan dapat menghindari konflik militer yang akan merugikan semua pihak. Ikatan ekonomi antara dua negara yang lebih kuat dan saling bergantung atau bahkan terintegrasi secara ekonomi, kepentingan ekonomi – dibandingkan dengan kepentingan nasional lainnya seperti pembangunan militer – menjadi yang paling penting.
2. Strategi pendekatan reunifikasi pihak China harus terus berubah dengan tetap mengedepankan pendekatan damai dan menghindari opsi militer.
3. Terjadi perubahan pandangan dari mayoritas penduduk Taiwan yang awalnya mengambil sikap *status-quo* menjadi memilih opsi reunifikasi. Hal ini dapat terjadi diantaranya melalui peningkatan hubungan ekonomi, pariwisata, dan lain-lain.
4. Peningkatan kekuatan militer China untuk meningkatkan efek deteren militernya terhadap Amerika Serikat, sehingga dapat menekan keinginan Amerika Serikat untuk turut campur tangan dalam urusan reunifikasi China - Taiwan.
5. Yang terakhir, China harus dapat menjamin keamanan regional baik politik dan ekonomi negara kawasan, misalkan untuk sementara tidak memancing konflik yang terkait klaim di Laut Natuna Utara. Sehingga China focus pada permasalahan utama dan tidak membuka

konflik dengan negara lain terutama terkait klaim China terhadap perbatasan, misal: di laut Natuna Utara, dengan tujuan untuk menghindari konflik dengan negara tetangga secara bersamaan.

KESIMPULAN

Dalam persepsi ekonomi, peluang reunifikasi damai China – Taiwan masih terbuka, dengan catatan bila hubungan ekonomi ke dua negara dapat terus ditingkatkan sehingga menjadi ikatan ekonomi yang kuat, terintegrasi dan saling ketergantungan. Belajar dari konflik Rusia-Ukraina, opsi militer yang diambil oleh kedua belah pihak akan menyebabkan “kehancuran ekonomi” kedua negara secara bersamaan.

Tetapi perlu pendekatan lain yang harus sejalan terutama untuk menarik mayoritas penduduk Taiwan yang *status quo* menjadi mendukung reunifikasi damai. Strategi lain adalah terus memacu peningkatan kemampuan militer China untuk dapat meningkatkan efek deterren terhadap Amerika Serikat dan aliansi militernya, dengan tujuan agar Amerika Serikat dapat menahan diri untuk tidak turut campur tangan terhadap permasalahan yang terkait reunifikasi. Pada saat yang sama, China juga harus dapat menahan diri untuk tidak membuka konflik dengan negara lain terutama dengan negara-negara di kawasan laut Natuna Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ammar, et. Al. (2023), How Disruptive Would A Military Escalation Of The China-Taiwan-Conflict Be To Global Economies?, Technische Hochschule Brandenburg, <https://doi.org/10.25933/opus4-2894>
- BBC News (2021). China-Taiwan tensions: Xi Jinping says 'reunification' must be fulfilled. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58854081>
- Blanchette, J & Gerard DiPippo (2022), “Reunification” with Taiwan through Force Would Be a Pyrrhic Victory for China, CSIS, <https://www.csis.org/analysis/reunification-taiwan-through-force-would-be-pyrrhic-victory-china>
- Chang, C.C. & Yang. A.H. (2020). Weaponized Interdependence: China's Economic Statecraft and Social Penetration against Taiwan. *Orbis*. 64(2): 312–333
- Chao, Chien-min. 2003. “Will Economic Integration between Mainland China and Taiwan Lead to a Congenial Political Culture?” *Asian Survey* 43(2): 280-304.
- Chen, C.K. (2009). China and Taiwan: A Future of Peace ? A Study Of Economic Interdependence. *Taiwan Domestic Politics And Cross-Strait Relations*. *Josef Korbel Journal Of Advanced International Studies*.
- Chen, Yu-Jie. 2022. “‘One China’ contention in China–Taiwan relations: law, politics and identity.” *China Quarterly* 252
- Colvin, G (2020), Why China-Rivalry Is at a Crucial Turning Point and What it Means for Business, *Fortune*, <https://fortune.com/longform/us-china-relations-global-500-companies-trade-xi-trump-business/>
- Crane, George T. 1993. “China and Taiwan: Not Yet ‘Greater China’.” *International Affairs* 69(4): 705-723.
- Daniel, H.R. & Zhi Wang (2010), Deepening China-Taiwan Relations through the Economic Cooperation Framework Agreement, *Policy Brief*, No. P B 1 0, Peterson Institute for International Economic. <https://felixpena.com.ar/contenido/negociaciones/anexos/2010-08-pb10-16.pdf>
- Davidson, L. E. (2015), Linked Without Linking: The Role of Mainland China’s Taiwanese Students in Cross-Strait Unification, *ASIANetwork Exchange*, Vol. 22 (2).

- DiPippo, G (2022), What Are the Economic Stakes of a Taiwan Conflict?, CSIS, <https://www.csis.org/analysis/are-washington-and-beijing-collision-course-over-taiwan>
- Election Study Center, National Chengchi University (2022), Taiwanese / Chinese Identity(1992/06~2022/06), <https://esc.nccu.edu.tw/PageDoc/Detail?fid=7800&id=6961>
- ESC 2022; “Jiang Qichen cheng Zhongguo shi Taiwan zhuyao weixie Chao Shao-kang: lundian bu jingzhun” (Johnny Chiang said China is Taiwan’s main threat. Chao Shao-kang: imprecise), Zhongyang tongxunshu, 4 March 2021, <https://www.cna.com.tw/news/aip/202103040023.aspx>.
- Ezra, I. and Chen, N.H. (2003), “The economic integration of Taiwan and China and its implications for cross-strait relations”, available at: <https://projects.iq.harvard.edu/files/fellows/files/chen.pdf>
https://www.taiwan.gov.tw/content_6.php
- Global Firepower. (2022). 2022 Military Strength Ranking. <https://www.globalfirepower.com/countries-listing.php>
- Hunkovic, L.J. (2009), The Chinese-Taiwanese conflict possible futures of a Confrontation between China, Taiwan and the United States of America, 1996 (August 1958).
- Kastner, S.L., (2006). Does Economic Integration Across the Taiwan Strait Make Military Conflict Less Likely?, *Journal of East Asian Studies*. 6, 319–346
- Klement, J. (2021). Geo-Economics: The Interplay between Geopolitics, Economics, and Investments. CFA Institute Research Foundation.
- Korbel, J. and Chen, C.-K. (2009), “Digital commons @ DU China and Taiwan: a future of peace? A study of economic interdependence, Taiwanese domestic politics and cross-strait relations China and Taiwan: a future of peace? A study of economic interdependence, Taiwanese domestic politics and cross-strait relations”, *Journal of Advanced International Studies*, Vol. 1, pp. 14-25, <https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=advancedintlstudies>
- Li, Zhanshu. 2020. “Zai ‘Fanfenlie guojia fa’ shishi 15 zhounian zuotanhui shang de jianghua” (Speech at symposium on the 15th anniversary of the Anti-secession Law's implementation). Xinhua. 29 May. [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=...)
- Morrison, W. M. (2019), China’s Economic Rise: History, Trend, Challenges, and Implications for the United States, *Congressioan Research Services*, https://www.everycrsreport.com/file/20190625_RL33534_088c5467dd11365dd4ab5f72133db289fa10300f.pdf
- Overhaus, M., et al (2020), American Perceptions of China, *SWP Research Paper*, Stiftung Wissenschaft und Politik -SWP- *Deutsches Institut für Internationale Politik und Sicherheit*. <https://doi.org/10.18449/2020RP04>
- Ryan Haas & Abraham (2020), Order from Chaos More Pain then Gain: How The US-China Trade War Hurt America, <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/08/07/more-pain-than-gain-how-the-us-china-trade-war-hurt-america/>
- TAO (Taiwan Affairs Office and Information Office of the State Council of the People's Republic of China). 2000. “The One-China Principle and the Taiwan Issue.” White Paper. 21 February. <http://en.people.cn/features/taiwanpaper/taiwan.html>. [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=...)
- Tiezzi, S (2022), China’s New White Paper Lays out Vision for Post ‘Reunification’ Taiwan, *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2022/08/chinas-new-white-paper-lays-out-vision-for-post-reunification-taiwan/>

- Teng, J. E. (2019), Taiwan and Modern China, *Asian History*,
<https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190277727.013.155>
- Tung, C.Y. (2004). Economic Relations Between Taiwan And China. *Unisci Discussion Papers*. Institute of International Relations National Chengchi University. Taiwan
- ¹ BBC News (2021). China-Taiwan tensions:
- Walker, R. (2022), China and the US: On collision course for war over Taiwan, DW.com,
<https://www.dw.com/en/china-and-the-us-on-collision-course-for-war-over-taiwan/a-64225119>
- Xi Jinping says 'reunification' must be fulfilled. <https://www.bbc.com/news/world-asia-china-58854081>